

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian skripsi penulis, menunjukkan bahwa

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 telah diterapkan secara efektif oleh Pemerintah Kota Solo. Dalam pembangunan *Skybridge* Solo Balapan – Terminal Tirtonadi, pemerintah melakukan tahapan – tahapan proses dari perencanaan hingga pada ganti kerugian terutama pada pemilik atas tanah hak milik di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo. Hal ini dapat dilihat dari data responden yang telah mendapatkan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 walaupun dalam hal sosialisasi terhadap masyarakat dirasa kurang tersampaikan dengan baik.
2. Adapun beberapa kendala yang dihadapi pemerintah terhadap warga ketika proses tahapan pembangunan *Skybridge* Solo Balapan – Terminal Tirtonadi Solo. Dari permasalahan uang ganti kerugian, keterlambatan uang ganti rugi, dan pihak yang tidak setuju dapat diatasi oleh pemerintah dengan adanya musyawarah yang cukup panjang, hal ini merupakan upaya pendekatan kepada masyarakat. Kedisiplinan pemerintah terhadap tahapan

proses sesuai Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012.mendapatkan hasil, yaitu terbangunnya *Skybridge* Solo Balapan – Terminal Tirtonadi Solo pada tahun 2016. Dan juga mendapatkan dukungan dari warga Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo.

B. SARAN

1. Perlunya pemerintah memerhatikan mengenai pelaksanaan tahapan Sosialisasi yang cukup kepada warga terdampak (baik tertulis maupun lisan). Pemberian sosialisasi yang memadai dapat memberikan informasi yang utuh kepada warga terdampak, sehingga proses tahapan-tahapan pembangunan *Sky Bridge* dapat berjalan baik.
2. Perlunya Pemerintah memerhatikan mengenai tahapan pelaksanaan musyawarah sehingga semua warga dipastikan hadir beserta seluruh perangkat desa. Dengan begitu keputusan dapat memberikan keadilan terhadap warga terdampak atas pembangunan *Sky Bridge Solo Balapan - Tirtonadi*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Arie Sukanti Hutagalung, 2008, *Kewenangan Pemerintah Bidang Pertanahan*, Rajawali, Jakarta,
- Salindeho Jhon, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Abdurrahman, 1991, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Koeswahyono Imam 2008 “*Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*”
- Urip Santoso 2012, *Hukum Agraria Kajian Konprehensif*, Kencana, Jakarta Hlm.92
- Sumardjono Maria S.W., 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implmentasi*, Kompas Media Nusantara
- Mertokusumo, Sudikno 1996 .Artikel Hukum “Kertas Kerja Untuk Didiskusikan di Kejaung RI”, Yogyakarta
- Urip Santoso, Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2011
- Soemardjono, Maria S.W. 2002 Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya

John Salindeho, 1998 “Masalah Tanah dalam Pembangunan”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta

Abdurrahman, 1991 “Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia”, Citra Aditya Bakti, Bandung

Muhammad Bakri, 2007 “Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)”, Citra Media, Yogyakarta,

Perlindungan, A.P, 1998 “Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria”, Mandar Maju, Bandung, Cet. VIII

Jurnal:

Makalah seminar *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, tanggal 27 September 2012.

Nurhasan Ismail, “*Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat*“, Makalah disampaikan pada Acara Seminar tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional, yang diselenggarakan Badan Pembinaan.

Subketi Rahayu, 2016, “*Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*“, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 5 No. 2.

Sunarno, *Tinjauan Yuridis-Kritis terhadap Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Disampaikan dalam seminar dosen FH-UMY dalam [Http://www.umi.ac.id/hukum/download/agraia%201.PDF](http://www.umi.ac.id/hukum/download/agraia%201.PDF)

Peraturan perundang - undangan:

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan atas perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perubahan ketiga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Keempat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015.

Internet:

<https://mediaindonesia.com/read/detail/179063-pembangunan-infrastruktur-untuk-manfaat-jangka-panjang> diakses pada 12 September 2019.

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-infrastruktur.html> diakses pada 12 September 2019.

<http://etd.repository.ugm.ac.id/> oleh Arief Muhammad, *Redesain Stasiun Solo Balapan Ruang Publik Sebagai Landmark Kota*, hlm.39. diakses pada 12 September 2019.

<https://www.hukumproperti.com/articles/penilaian-ganti-kerugian-dalam-pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum/> diakses pada 13 September 2019.